

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SOREK SATU KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RIRIN WANDES OCTAVIA
157310299

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ririn Wandes Octavia
Npm : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam
Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang Ujian Konprehensif.

Pekanbaru, 01 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si


Andriyus., S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

ii

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ririn Wandes Octavia
Npm : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

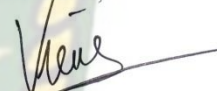
Pekanbaru, 01 Maret 2020

Ketua,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota



Rizki Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota



Andriyus., S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

iii

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ririn Wandes Octavia
Npm : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam
Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan
Pangkalan Kurus Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 01 Maret 2020

Ketua,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 036 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 19 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Feb 2020 jam 11.00 – 1211.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ririn Wandes Octavia
 NPM : 157310299
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : *Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam PEngelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.*

Nilai Ujian : Angka : "78,1" ; Huruf : "B_T"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Ahmad fitra Yuza, MA	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, MA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 20 Februari 2020
 An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 881/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 120802444
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Andriyus, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 160102527
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Ririn Wandes Octavia**
NPM : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.
- Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I/Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --SK Pembimbing.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 036/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Ririn Wandes Octavia**
N P M : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pengkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Andriyus.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Rijalul Fikri.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya atas Rahmat dan Petunjuk-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan** dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjalani proses pendidikan di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
6. Bapak serta Ibu Dosen selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan
7. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam Administrasi Perkuliahan
8. Kepala Dinas dan Seluruh Staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Sorek Satu Kabupaten Pelalawan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian ini
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahku Yasril dan Ibuku Desmarni yang selalu setia memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Untuk Adikku Renia Febriani yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini
11. Untuk temanku Muhammad Ikhsan yang telah memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan perkuliahan
12. Untuk teman dekatku Mikky, Nadia, Ihwil, Ipal dan Acin yang telah memberikan motivasi

13. Seluruh teman seperjuangan angkatan 15 Ilmu Pemerintahan Kelas H dan Teman-teman yang tak disebutkan namanya InsyaAllah juga akan menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan.
14. Seluruh teman tergila di HIMIP Andika , Elisya Fitriani, Siti Zubaidah, Iranda Firiansyah, Damai Shinta Permata, Ricky Maulana dan Bambang Setiadi;
15. Untuk Keluarga seangkatan dan Adik-adik di HIMIP 2018-2019 terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan.

Penulis telah memberikan upaya terbaik dalam penyusunan skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa karya ini masih perlu penyempurnaan, sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan karya tulis ini di masa datang. Akhirnya harapan Penulis semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

Penulis

Ririn Wandes Octavia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Studi Kepustakaan.....	15
2.1.1. Teori Ilmu Pemerintahan.....	15
2.1.2. Teori Pemerintahan	17
2.1.3. Teori Organisasi	20
2.1.4. Teori Peranan.....	23
2.1.5. Teori Pengelolaan.....	25
2.1.6. Teori Pasar.....	31

2.1.7. Teori Pasar Tradisional.....	33
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pikir.....	36
2.4. Konsep Operasional	37
2.5. Operasional Variabel.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian.....	40
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Informan dan Key Informan.....	41
3.4. Teknik Penentuan Informan.....	41
3.5. Jenis dan Sumber Data	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	44
3.9. Rencana Sistematika Laporan Skripsi	45

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	46
4.1.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan.	47
4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan	48
4.1.3. Topografi Kabupaten Pelalawan	52
4.1.4. Demografi Kabupaten Pelalawan	52
a. Kondisi Penduduk Kabupaten Pelalawan	52
b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pelalawan	54
c. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pelalawan	55

1. Pendidikan.....	55
2. Kesehatan	56
3. Agama	57
d. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden	59
5.1.1. Tingkat Pendidikan.....	59
5.1.2. Jenis Umur.....	60
5.1.3. Tingkat Kelamin.....	60
5.2. Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar	
5.3. Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten	
5.4. Pelalawan	61
5.4.1. Perencanaan.....	63
5.4.2. Pengorganisasian	71
5.4.3. Pengarahan.	78
5.4.4. Pengawasan.	84
5.5. Hambatan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar	
5.6. Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan	
5.7. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	91
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	92
6.2. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Pelalawan.....	10
I.2 Data Jumlah Kios Yang Terisidi Pasar Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	13
II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
II.2 Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu	40
III.1 Informan Penelitian dan Key Informan.....	42
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu	45
IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pelalawan	51
IV.2 Jumlah Sekolah Negeri Menurut Kecamatan Tingkat Sekolah Tahun 2017.....	56

IV.3 Jumlah Sekolah Swasta Menurut Kecamatan Tingkat Sekolah Tahun 2017.....	57
IV.4 Nama Bupati Pelalawan dan Masa Jabatannya.....	59
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	60
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu.....	37
IV.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pelalawan.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Wandes Octavia
NPM : 157310299
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
BD A92AHF339629070
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis


Ririn Wandes Octavia

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SOREK SATU KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh
RIRIN WANDES OCTAVIA

Kata Kunci :Peran, Pengelolaan, Pasar Tradisional

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan serta untuk mengetahui faktor penghambatannya. Indikator yang digunakan meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Fenomena yang penulis temui yaitu: 1. Kurangnya pengawasan dan ketegasan dari petugas bagian pengelolaan pasar Disperindag Kabupaten Pelalawan dalam hal pemungutan retribusi pasar di Pasar Sorek Satu terhadap kios-kios dan los. 2. Kurang efektifnya Tugas yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar yang mengakibatkan pedagang tidak mentaati Peraturan Daerah. 3. Masih banyak pedagang kaki lima yang kurang menyadari akan tata tertib aturan-aturan yang berlaku. Tipe Penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu untuk menyelidiki objek yang yang tidak dapat diukur menggunakan angka karena tujuannya mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena saat penelitian berlangsung. *Key Informan* yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, dan informan yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Pasar dan pedagang di Pasar Sorek Satu. Jenis penelitian penulis berasal dari Data Primer yaitu diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekundernya yaitu data diperoleh untuk melengkapi data primer. Sedangkan Teknik Analisis Data berupa gambaran dari temuan-temuan di lapangan berupa data dan informasi dari wawancara dan dokumentasi.

**THE ROLE OF TRADING AND MARKET INDUSTRY IN THE
MANAGEMENT OF SOREK TRADITIONAL MARKET OF PANGKALAN
KURAS DISTRICT, PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

**By
RIRIN WANDES OCTAVIA**

Keywords: Role, Management, Traditional Markets

The purpose of this study was to determine the management of the Sorek traditional market in one of the Pelalawan regency bases, and to determine the factors of their position. The indicators used include Planning, Organizing, Mobilizing and Supervising. The phenomenon that the authors encountered is: 1. Lack of supervision and firmness of the market management officer of the Department of Industry and Trade of Pelalawan Regency in terms of collecting market levies at the Sorek Satu market for stalls and stalls. 2. Ineffective Tasks performed by the Market Management Division in managing markets that result in traders not obeying Regional Regulations. 3. There are still many street vendors who are less aware of the rules and regulations applicable. This type of research uses descriptive qualitative, which is to investigate objects that cannot be measured using numbers because the goal is to reveal events or facts, circumstances and phenomena during the research. Key informant is the Head of Market Management, and the informant is the Head of the market management section and traders in Sorek Satu Market. The type of author's research comes from primary data that is obtained directly from informants through interviews and documentation and secondary data that is data obtained to complete primary data. While the data analysis technique is in the form of a description of the findings in the field in the form of data and information from interviews and documentation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pembukaan Undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah di atur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana di jelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintah Pusat dan Daerah, pada bagian ketiga yaitu urusan pemerintah konkuren yang di jelaskan dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Absolut menjadi :

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal Nasional
- f. Agama

Urusan Pemerintah yang konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintah wajib sebagaimana terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal

12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan keluarga berencana;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 12 disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah urusan pilihan yaitu urusan perindustrian dan perdagangan.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kampar. Dasar pembentukan kabupaten ini adalah Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Ibukota Kabupaten Pelalawan Terletak di Pangkalan Kerinci. Luas Wilayah Kabupaten adalah sekitar $13.924,94km^2$, dibelah oleh dua aliran sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai Kampar kanan dan sungan Kampar kiri. Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran

rendah membentang kearah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten pelalawan antara lain :

1. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti.
2. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Peny, Indragiri Hulu.
3. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Program;
 2. Sub bagian umum dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan;
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Usaha Industri;
 3. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri.
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
2. Seksi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan;
3. Seksi Pengandaan dan Penyaluran.
5. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 1. Seksi Lembaga dan Pengaduan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Beredar;
 3. Seksi Metrologi.
6. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Kerjasama;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan telah di bentuk Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar kemudian menindak lanjuti perda tersebut pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2011. Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan usulan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri.

Fungsi Bidang Perindustrian.

1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri.
2. Pendorong terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan serta kegiatan pengembangan industri.
3. Penyusunan rencana kerja dan melaksanakan program pembangunan industri.

4. Pembinaan pengendalian mutu hasil industri terhadap pencemaran lingkungan dan penebangan kawasan industri.
5. Pelaksanaa pemantauan evaluasi pelaksanaan tugas serta pengawasan di bidang industri.
6. Penyusunan laporan sesuai prosedur yang ditetapkan dan memberikan petunjuk teknis di bidang industri.

- b. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas, bimbingan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk pengembangan perdagangan daerah.

Fungsi Bidang Perdagangan.

1. Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan
 2. Penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana dan perdagangan
 3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang perdagangan.
 4. Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor.
- c. Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, rehabilitas dan pengelolaan pasar.

Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar

1. Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolan pasar.
2. Menyiapkan rencana sarana dan prasarana pasar.
3. Menyiapkan rencana ketertiban dan kebersihan pasar.
4. Menyusun rencana kerja unit pelaksana teknis pasar.
5. Melaksanakan penarikan retribusi pasar.
6. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar.

7. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan pasar.
8. Melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan pasar.
9. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar.
10. Penyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar.
11. Penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan pasar.
12. Penyelenggaraan pengelolaan pasar.

Menurut Sondang P. Siagian (1997) “ Pengelolaan adalah Keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga / bantuan orang lain, oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan.

Berikut data dan jumlah pasar dalam pengelolaan pasar tradisional sorek satu kabupaten pelalawan dapat dilihat berdasarkan data table berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Pelalawan

o.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan
	Pangkala kerinci	Kel. Pkl.Kerinci Timur
		Kel. Pkl.Kerinci Barat
	Bandar Sei Kijang	Kel. Bandar Sei Kijang
		Desa Kiyap Jaya
		Desa Simpang Beringin
	Langgam	Desa Segati
		Desa Langkan
		Desa Gondai

		Kelurahan Langgam
		Desa padang Luas
		Desa sotol
		Desa penarikan
n	Pelalawa	Desa kuala tolam
		Kelurahan pelalawan
		Desa rangsang
		Desa sungai ara
	Bunut	Kelurahan bunut
		Desa balam merah
		Desa sungai buluh
		Desa merbau
n kuras	Pangkala	Kelurahan sorek satu
		Desa beringin indah
		Desa harapan jaya
		Desa sialang indah
		Desa sidomukti
		Desa palas
		Desa terantang manuk
	Bandar	Desa palas
petalangan		Desa kuala semundam

		Desa sialang godang
		Desa tambun
	Pangkala	Kelurahan pangkalan lesung
	n lesung	Desa mayang sari
		Desa tanjung kuyo
		Desa genduang
		Desa mulya subur
		Desa sari mulya
	Ukui	Desa bukit jaya
		Desa simpang pulai
		Desa air emas
		Desa kampung baru
		Desa lubuk kembang bungo
		Desa lubuk kembang sari
		Desa silikuan hulu
		Desa bukit gajah
		Desa trimulya jaya
		Kelurahan ukui I
		Desa bagan limau
0	Kerumuta	Kelurahan kerumutan
n		Desa pangkalan panduk

		Desa tanjung air hitam
		Desa lipai bulan
		Desa lembah subur
		Kelurahan kerumutan
		Desa beringin makmur
		Desa mak teduh (pematang tengah)
		Desa mak teduh
1	Teluk meranti	Desa teluk binjai
		Desa kuala panduk
		Kelurahan teluk meranti
		Desa labuhan bilik
		Desa segamai
		Desa gambut mutiara
		Desa pulau muda
		Desa sebekik
2	Kuala kampar	Desa sokoi
		Kelurahan teluk dalam
		Desa serapung
		Desa teluk beringin

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar 2019

Dapat dilihat dari table diatas data jumlah pasar kabupaten pelalawan terdiri dari 12 kecamatan da setiap kecamatan memiliki jumlah desa/kelurahan yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada kecamatan pangkalan kurus dan kelurahan sorek satu.

Tabel 1.2 Data Jumlah kios yang terisi di Pasar Baru Kelurahan Sorek satu Kecamatan Pangkalan Kurus Kabupaten Pelalawan.

o.	Jenis Tempat	Jumlah yang tersdia	Jumlah yang terisi
1.	Kios	110	60
2.	Los	50	120
3.	Dasaran	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan 2019

Beberapa permasalahan yang saya dapat dilapangan diantaranya :

Pertama , masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan sudah tidak layak untuk ditempati, dan mushola yang tidak terawat, lahan parkir yang sempit, akibat toilet umum dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena tidak ada air. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti toilet dan mushola dan tempat parkir harus ditingkatkan juga biar bebanding lurus dengan retribusi

yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung kepasar.

Kedua, hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa banyak pedagang kaki lima yang masih tidak mentaati peraturan dengan berjualan di emperan pasar, dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mempunyai lahan untuk berjualan, dan mereka semena-mena berjualan ditempat umum, sehingga pasar menjadi tidak teratur.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut serta dukungan informasi dari pedagang dan masyarakat di Sorek Satu, penulis menemukan beberapa fenomena diantaranya :

1. Masih Kurangnya pengawasan dan ketegasan dari petugas bagian pengelolaan pasar Disperindag Kabupaten Pelalawan dalam hal pemungutan retribusi pasar di pasar Sorek Satu terhadap kios-kios dan los.
2. Masih Kurang efektifnya Tugas yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar yang mengakibatkan pedagang tidak mentaati Peraturan Daerah.
3. Masih banyak pedagang kaki lima yang kurang sadar akan tata tertib aturan-aturan yang berlaku

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas. Penulis mengemukakan suatu perumusan permasalahann sebagai berikut: **Bagaimana Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan pasar tradisional sorek satu oleh dinas di kecamatan pangkalan kurus.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengelola pasar tradisional sorek satu oleh dinas di kecamatan pangkalan kurus.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian Adalah:

- a. kegunaan Teoritis , diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi masyarakat dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kurus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat di terima oleh yang bersangkutan pada saat di butuhkan) jadi normative, idela dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang di harapkan atau tidak) jadi empirik. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2005:21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan di fungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Munasef (dalam syafiie.2007:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan antara

hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu,

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan ke dalam atau keluar,
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang di perintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan-pertentangan.
4. Pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
5. Ilmu yang di terapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Ndraha (dalam Sadu 2013) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Ndraha (2007:9) mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan pelayanan *civil* dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;3) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari pemerintahan menurut Rasyid bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

2.1.2 Teori Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif proses demand-supply, produksi konsumsi, pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi feedback.

Pemerintahan adalah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan dan tuntutan rakyat Ndraha (2003:146)

Secara umum pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Dari sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka
2. Dari sistem pemerintahan birokratis-partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan
3. Dari sistem pemerintahan hyper sentralistik ke system pemerintahan desentralistik
4. Dari pertanggung jawaban vertical ke pertanggung jawaban horizontal (pertanggung jawaban pasar)
5. Dari pternalisme despotic ke control social
6. Dari susksesi (penggantian jabatan) berdasarkan dinasti atau anugerah ke recruitment dan selection
7. Dari lompatan ke tahapan teknologi
8. Dari manajemen proyek ke manajemen fungsi dan tugas
9. Dari budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik
10. Dari kita menjadi saya
11. Unit kerja pemerintahan yang paling bawah diperlukan sebagai embel-embel, pelengkapan penderita diabaikan
12. Dari pemberian ke pemberdayaan
13. Dari sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aspirasi rakyat, kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bahasa birokrasi
14. Dari menolong ke dialog (Ndraha 2003:149)

Fungsi-fungsi pemerintah dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri, jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan

kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran Rasyid (dalam Hamdi. 2006:72)

Ndraha (2001:74-75) menjelaskan berbagai konsep tentang pemerintahan sebagai berikut :

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute pro pading* suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
4. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi, birokrasi adalah aparat pemerintah yang di angkat atau ditunjuk dan bukan dipilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
6. Pemerintah dalam arti pelayanan, di ambil dari konsep *civie servanc*, di sini pemerintah di anggap sebagai sebuah warung (Toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli)
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang di anggap mewakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hokum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep wilayah, pemerintah dalam airt ini di kenal dengan negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, contohnya Indonesia di bawah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Kekuasaan urusan pusat di daerah di kelola oleh pemerintah wilayah.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan belanda di bahas secara panjang lebar oleh Bayu Suryaningrat dalam mengenal ilmu pemerintahan.

11. Pemerintahan dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang di anggap mampu, normatif atau secara infirik memproses jasa public dan layanan civil.

Selanjutnya dalam buku yang sama Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Seperti yang dikemukakan oleh Sedermayanti (2004;35) pemerintah (Government) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota yang sebagainya.

2.1.3 Teori Organisasi

S.P Hasibuan malayu (2009:5) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah karangka didalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa

anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi meruakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

Istilah organisasi berasal dari bahasa inggris Organization (latin, organizare) berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi organisasi dapat dipandang sebagai produk kegiatan organizing. Menurut Stephen P. Robbins dalam (Taliziduhu Ndraha 2011:235)

Menurut James D. Mooney (Dalam hasibuan, 2009;120) organisasi adalah setiap bentuk berserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Pradjudi (dalam hasibuan 2009;121) organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan tata hubungan kerja atara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Aspek-aspek penting dari definisi-defenisi di atas adalah :

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya sistem kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
5. Adanya keterkaitan formal dan tata tertib yang harus ditaati
6. Adanya pendelegasi wewenang dan koordinasi tugas-tugas

7. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
8. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

Arnad (dalam Thoha 2011;167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang terkoodinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dan dua manusia atau lebih.

Sutarto (dalam syamsir 2013;25) bahwa organisasi adalah perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhebugan dari bagian menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.

Dari beberapa teori diatas, dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki beberapa variabel yaitu: (dalam syamsir 2013:26)

1. Taksonomi organisasi
2. Struktur organisasi
3. Proses dalam organisasi
4. Individu dalam organisasi

Secara sadar maupun tidak, manusia telah melakukan kegiatan organisasi yang mana adanya perilaku serta tindakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa bantuan kerja sama dari orang lain. Organisasi merupakan wadah dalam menjalankan kegiatan administrasi dan manajemen.

Selain itu, teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya adalah membahas

tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsinya dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut.

2.1.4 Teori Peranan

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Peranan menurut Soekanto (2002:243) : “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soekanto (2005:269) kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian dalam sosiologi antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah

pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kedudukan suatu organisasi.

Menurut Rivai (2006;148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Menurut Narwoko (2004;138-139) peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.

Menurut Karl (2002;431) konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.

Selanjutnya peranan melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan harus dilaksanakan jika ingin mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat.
2. Peranan melekat individu-individu yang mampu melaksanakannya.
3. Belum tentu semua orang dapat melaksanakan perannya.
4. Baik karena terbentur dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban.

2.1.5 Teori pengelolaan

Manajemen sumber daya manusia menurut terry dalam hasibuan, (2012:2) adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

Menurut marwansyah (2010:3), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pandayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Menurut George R. Terry, 1958 dalam buku *Principles of management* (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif dan dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan.

George R. Terry, 1958 dalam bukunya membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu ;

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang akan menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Pengarahan (*directing*), yaitu merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.

4. Pengawasan (*Controlling*), yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Menurut Mangkunegara, (2012:2) manajemen sumber daya merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengandaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengitegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Lebih lanjut manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelola dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Sependapat dengan Sutrisno, (2014:5) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemeberian balai jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Fathoni, (2006:10) manajemen sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting, yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut.

Manajemen atau pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).

Menurut Handoko 2008:8 manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagai kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan trkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tetap bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22), mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Menurut Suharsimi arikunto (2010:31) “Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadminis dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkai pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan

memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri sama kaitannya dengan Manajemen.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang dimaksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan terhadap sumber-sumber pendapat Asli Daerah.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas

manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.6 Teori Pasar

Menurut Kotler dan Armstrong (1999) Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.

Banyak pemasaran memandang penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka produksi dan

mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar sebagai gantiya, mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar “Kotler dan Amstrong, 1999”

Menurut Abdullah (2016;19), Pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang dimiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mampu turut dalam penukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Jadi pasar tergantung dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, punya sumber daya yang diminati orang lain, dan mau menawarkan sumber daya tersebut untuk ditukar agar dapat memenuhi keinginan mereka.

Menurut Stanton, Et Al (dalam Tjiptono 2008;59) pasar yaitu sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual, dan terjadinya perpindahan kepemilikan. Selain itu ada pula defenisi yang menyatakan bahwa pasar adalah permintaan yang dibuat oleh sekelompok pembeli potensial tentunya suatu barang dan jasa.

Menurut Susatyo Herlambang (2014;15), pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan puas untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakanya. Sedangkan Susatyo Herlambang (2014;15), pasar dalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual, dan terjadinya perpindahan kepemilikan dan kumpulan pembeli yang nyata dan potensial dari sebuah produk. Ukuran pasar tergantung kepada jumlah orang yang menunjukan kebutuhannya, mempunyai sumber daya untuk melakukan pertukaran dan terjadinya tawar menawar sumber daya dalam pertukaran itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Menurut Mursid (2014;25), pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau pasar adalah daerah atau tempat yang di dalamnya terdapat kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Sedangkan Menurut William J. Stanton (dalam Mursid, 2014;25) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puasa, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembeli mereka

Menurut Mursid (2014;27) ada pengertian pasar adalah sekumpulan orang tau keluarga atau instansi yang mempunyai kebutuhan dan daya beli.

Pasar pada hakikatnya dapat dibagikan dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Consumer Market (Pasar Konsumsi)
- b. Industrial/Producer Market (Pasar Industrial)
- c. Government Market

2.1.7 Teori Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota.

Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama dikawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang langsung dalam masyarakat (Sutiyanto, 2008).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjelaskan tentang pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Menurut Masitoh (2013) pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selali menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia.

Menurut Wicaksono (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung

menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

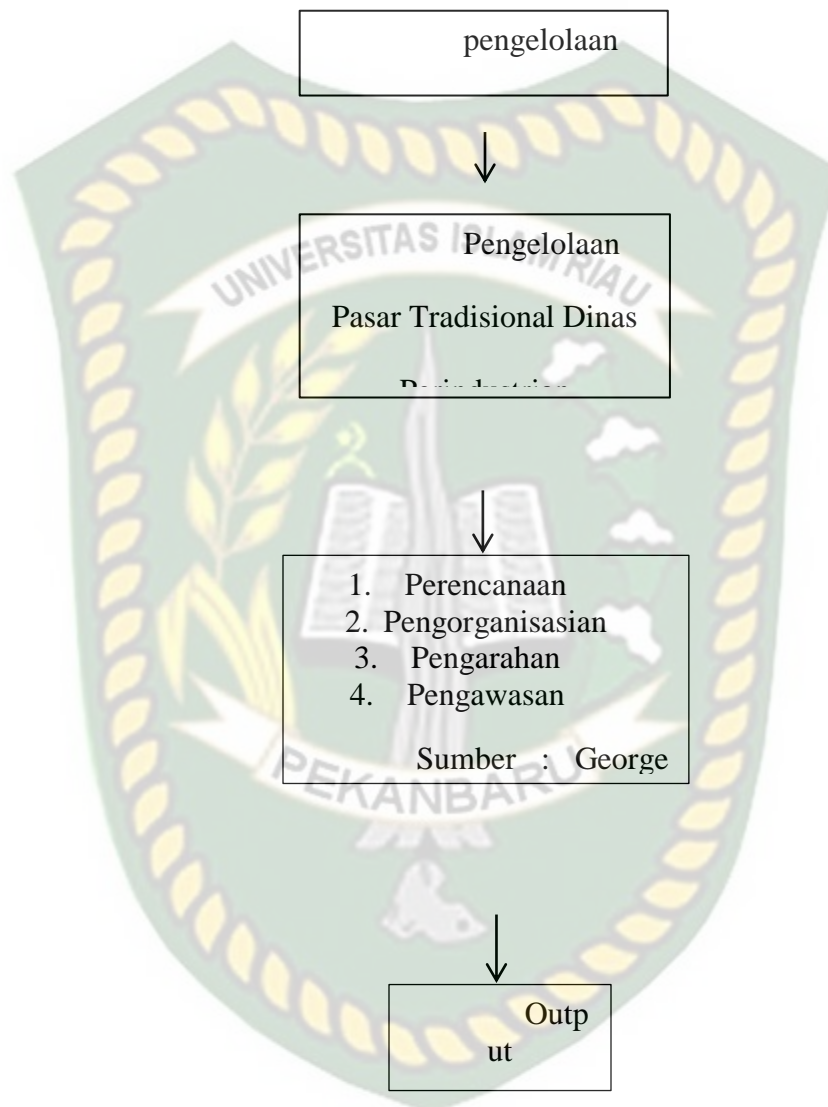
No.	Nama penelitian	N Tahun penelitian	Judul penelitian	Penjelasan
1.	Febri Fasonova	D 2017	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu	Perbedaan adalah lokasi yang diteliti berbeda
2.	Esi Anitasari	D 2017	Analisis Pelayanan Publik Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pelayanan Sarana Dan Prasarana)	Teori yang di gunakan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya yaitu dengan menggunakan

				teori George R. Terry
3.	H arianto	2 016	Evaluasi Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Rambah Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif

2.3. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam pengelolaan pasar, sebagaimana dapat dilihat pada kerangka pikir berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Data olahan penulis Tahun 2019

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa peristilahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu antara lain :

1. Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat di terima oleh yang bersangkutan pada saat di butuhkan) jadi normative, idela dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan).
2. pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya.
3. Organisasi adalah merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab.
4. “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.
5. Pengelolaan adalah individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang bearti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan

keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif dan dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan.

6. Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa, ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.
7. Pasar Tradisional Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 20 Tahun 2012 mempelajari Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Menjelaskan Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional adalah Penataan Pasar Tradisional Yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pasar Tradisional
8. Perencanaan sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan
9. Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya
10. Penggerakan yaitu merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.
11. Pengawasan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien.

<p>individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.</p> <p>Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif dan dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan</p>		<p>Pengarah an</p> <p>Pengawasa n</p>	<p>pengawasan tidak langsung</p>
--	--	---------------------------------------	----------------------------------

Sumber : Data olahan penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe Deskriptif adapun alasan menggunakan metode kualitatif menurut Taylor dan Bagdan (dalam Bagong Suyanto 2005:166) penelitian ini kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey desrptf dengan metode penelitian kualitatif karena penelitian mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana subjek penelitian ini berada, yang kemudian dijadikan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , yang mana pengelolaan pasar tersebut masih kurangnya sarana prasarana yang tidak terjalankan oleh masyarakat.

3.3. Informan dan Key Informan Penelitian

a. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006;145).

b. Key Informan

Key Informan adalah Merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong Suyanto:172) Key Informan di dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan pasar kabupaten pelalawan.

Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Sedangkan yang menjadi Informan penelitiannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Seksi pengelolaan pasar, Pedagang. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.I Informan Penelitian dan Key Informan

o.	Jenis Informan
	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
	Kepala Seksi Pengelolaan Pasar
	Tim Pengelolaan Pasar
	Pedagang

Sumber : Data olahan penulis 2019

3.4. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan Informan yang dipergunakan untuk Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala UPT Pasar, Pedagang dan Masyarakat mempergunakan *teknik purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014;96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.

Sampling Snowball (bola salju) adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan dari pihak pertama dalam hal responden terpilih sebagai sampel Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat memberikan informasi berkenaan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan bukti gambar bahwa peneliti sudah melakukan tahapan di atas secara nyata.

3.7. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuisisioner dan daftar wawancara kalau dikumpulkanselanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif atau pengelompokan dan penyajian angka-angka yang berbentuk tabel data tunggal,

kemudian data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan secara diskriptif sesuai dengan data yang didapat guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapat hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian tentang Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke											
		April 2019			Mei 2019			Juni 2019			Juli 2019		
.	Penyusunan UP												
.	Seminar UP												
.	Revisi UP												
.	Revisi Kuisisioner												

.																		
.	Survei Lapangan																	
.	Analisis Data																	
.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																	
.	Konsultasi Revisi Skripsi																	
.	Ujian Skripsi																	
0.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																	
1.	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																	

3.9. Rencana Sistematika Laporan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
- BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir yang meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Fikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran
- BAB III : Metode Penelitian yang meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.
- BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang meliputi Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial, Keadaan Pemerintahan
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- BAB VI : Penutupan yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut dihadiri seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan Pakantua yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, Kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten pelalawan 13.924,94 KM, yang sebagian besar wilayah terdiri atas daratan, sebagian lainnya Kepulauan. Beberapa Pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau keil lainnya.

4.1.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan berawal dari Kerajaan Pakantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (Sekitar tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Tamasik (singapura). Beliau adalah orang besar di Kerajaan Tamasik yang dikalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini adalah dahulu sungai Pakantua, lebih kurang 20 KM di Hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar), sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, pada tempat yang bernama Pematang Tuo.

Sekitaran Tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan Kepindahan itu, maka nama kerajaan Pakantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan yang maknanya tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmiah nama kerajaan pakantua Kampar diganti dengan Kerajaan Pelalawan, dan nama ini terus dipakai sampai kerajaan pelalawan berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa selanjutnya, kerajaan Pakantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka setelah kerajaan ini mampu mengalahkan Kerajaan Pekantua. Raja Malaka bernama Sultan Mansyur Syah pun menjadi raja dari Kerajaan Pekantua. Nama kerajaan Pekantua diubah menjadi “Kerajaan Pekantua Kampar”. Setelah Sultan Mansyur Syah wafat, ia digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masa inilah Kerajaan Malaka kemudia diserang dan dikalahkan oleh portugis yakni pada tahun 1511 M. Sejarah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Cap Kerajaan Istana Sayap Pelalawan Kerinci.

Pada masa Pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 M terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekantua Kampar ke daerah Sungai Rasau yang juga merupakan salah satu anak sungai kampar. Dan selanjutnya, nama Kerajaan Pekantua Kampar pun diganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan. Didalam upacara tersebut, gelar beliau yang mulanya Maharaja Dinda II, disempurnakan Menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau sering juga disebut Maharaja Lela Dipati.

Pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, Raja dari Kerajaan Pelalawan bernama Tengku Said Harun bersama orang-orang besar lainnya dari Kerajaan Pelalawan, menyapaikan pernyataan taat, setia serta bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Setelah Raja Tengku Said Harun mangkat, atas jasa-jasanya tersebut, beliau diberi gelar “Marhum Setia Negara”.

Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Pelalawan yang masih dikenal hingga saat ini. Istana ini awalnya dibangun oleh Sultan Pelalawan ke-29 yang bernama Tengku Sontol Said Ali (1886-1892 M). Sebelum istana tersebut selesai dibangun, beliau mangkat dan diberi gelar Marhum Mangkat di Balai. Selanjutnya proses pembangunan istana tersebut diteruskan hingga selesai oleh pengganti Tengku Sontol Said Ali, yakni Sultan Syarif Hasyim II (1892-1930).

4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, ada juga di

perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas kabupaten pelalawan. Kecamatan Pangkalan Keirnci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 KM sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibuota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang menjadi 12 daerah kecamatan terdiri atas 4 daerah kecamatan definitif serta daerah kecamatan pembantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Definitif

1. Kecamatan Langgam dengan luas 916,61 km₂
2. Kecamatan Bunut dengan luas 1.339,96 km₂
3. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas 2.158,68 km₂
4. Kecamatan Kuala Kampar dengan luas 4.656,34 km₂

b. Kecamatan Pembantu:

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 616,40 km₂
2. Kecamatan Ukui dengan luas 407,73 km₂
3. Kecamatan Pelalawan dengan luas 930,63 km₂
4. Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas 472,72 km₂
5. Kecamatan Kerumutan dengan luas 773,86 km₂
6. Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 217,49 km₂
7. Kecamatan Bandar Petalangan dengan luas 365,26 km₂
8. Kecamatan Bandar Sekijang dengan luas 98,90 km₂

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat. Sebagai kabupaten yang masih baru, pelalawan bisa dibilang sebagai kabupaten yang cukup maju.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, perairan, adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kecamatan dilihat dari table dibawah ini:

Tabel IV.I : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

o.	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Darat	Sungai i/danau/laut/situ	Total	% Wilayah
	Langgam	142,396,15	1,848,94	144,245,09	1,036
	Pangkalan Kerinci	18,716,16	639,37	19,355,53	1,39
	Bandar Sei Kijang	31,856,87	84,33	31,941,20	2,29
	Pangkalan Kuras	117,268,77	642,04	118,388,79	8,50
	Ukui	129,	687,2	129,	9

		268,77	9	956,06	,33
	Pangkalan	50,1	325,2	50,4	3
	Lesung	59,83	9	85,12	,63
	Bunut	40,6	182,6	40,8	2
		20,09	8	02,77	,93
	Pelalawan	147,060,05	2,751,26	149,811,31	10,76
	Bandar	36,9	258,8	37,2	2
	Petalangan	96,29	7	55,16	,68
	Kuala	80,9	69,35	150,	1
0	Kampar	05,73	9,46	256,19	0,79
	Kerumuta	95,3	689,3	96,0	6
1	n	14,31	5	03,66	,89
	Teluk	391,	32,84	423,	3
2	Meranti	140,47	3,94	984,41	0,45
		1,28	110,3	1,39	1
	jumlah	2,181,47	12,82	2,494,29	00,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,20' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara

- Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak)
- Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi)

Sebelah Selatan

- Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung)
- Kecamatan Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenaku)
- Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)

Sebelah Barat

- Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Saik Hulu), Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

Sebelah Timur

- Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13,924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423,984 Ha (20,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19,355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

4.1.3. Topografi Kabupaten Pelalawan

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah perbukitan yang bergelombang, secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter, dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0 \sim 15\%$ dan $15 \sim 40\%$. Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek 1 dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian $\pm 3,5$ meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah sungai kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ KM dengan kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter dan lebar rata-rata ± 143 meter. Sungai ini dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi.

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Sedangkan wilayah berikut dan bergelombang tanahnya termasuk jenis organosol (hostosal) dan humus yang mengandung bahan organik.

4.14. Demografi Kabupaten Pelalawan

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Pelalawan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 berjumlah 438.788 orang terdiri dari 225.234 orang laki-laki dan 213.554 orang perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 329.539 orang yang terdiri dari 169.421 orang laki-laki dan 160.188 orang perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode 2011-2017.

Tingginya laju pertumbuhan tersebut lonjakan penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai Kabupaten Baru.

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di Ibukota Kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 124.974 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni adalah Kecamatan Bandar Petalangan, sebanyak 14,368 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2017 sebanyak 111,154 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci 31,791 rumah tangga kemudian rumah tangganya yang sedikit yaitu Kecamatan Bandar Petalangan 3,699 rumah tangga.

Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut Kecamatan, semua Kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sebesar 13,924,94 km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah 30 jiwa per km² kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 32 jiwa per km².

Dari 12 kecamatan Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti merupakan Kecamatan terluas mencapai 4.239,84 km² atau 30,45% dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2017 Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni 17,581 orang penduduk dengan kepadatan empat prang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai Kecamatan dengan penduduk terjarang di Kabupaten Pelalawan.

Sebaliknya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang wilayahnya yang terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi Kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 646 orang per km² dan jumlah penduduknya sebesar 124,974 orang.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pelalawan

Sektor Industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB tahun 2012, selain itu, perekonomian Kabupaten Pelalawan juga didukung oleh sektor Pertambangan. Ada dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012 produksi minyak bumi mencapai 527,69% ribu barel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu mscf.

Pada Kabupaten Pelalawan ini terletak Kawasan Industri Kampar yang didalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

Di daerah Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa perusahaan perkebunan besar yang dominan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang bukan berasal dari Riau seperti Sinarmas dan RGE. Disamping itu perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan bukan hanya dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia saja, bahkan ada juga dari Negara-negara lain seperti Malaysia.

c. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pelalawan

1. Pendidikan

Tahun 2017, jumlah bangunan sekolah Negeri yaitu, Sekolah Dasar 198 Unit, SMP 54 Unit dan SMA/SMK 27 Unit, sedangkan jumlah kelasnya sebanyak 1.894 kelas untuk SD, 468 untuk SMP dan 261 untuk SMA/SMK.

Rasio murid-guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang tersedia. Semakin kecil angka rasio menunjukkan beban guru terhadap murid binaanya semakin ringan.

Secara umum rasio murid-guru sekolah negeri berturut-turut adalah, untuk SD 16, SMP 8, SMA/SMK 13.

Tabel IV.II : Jumlah Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Tahun 2017

Kecamatan	Sekolah Negeri				
	T K	S D	S MP	S MA	S MK
Langgam	9	1 7	5	3	0
Pangkalan Kerinci	2 4	1 4	4	3	1

Bandar Sei Kijang	6	8	3	1	1
Pangkalan Kuras	1	2	9	2	1
Ukui	5	8			
	1	1	5	1	1
	7	8			
Pangkalan Lesung	1	1	3	1	1
	3	4			
Bunut	6	1	3	1	1
		4			
Pelalawan	8	1	6	1	0
		3			
Bandar Petalangan	8	1	1	1	0
		1			
Kuala Kampar	1	2	7	1	1
		4			
Kerumutan	1	2	4	1	1
	5	1			
Teluk Meranti	1	1	4	3	0
		6			
Jumlah	1	1	5	1	8
	23	98	4	9	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 2018

Tabel IV.III : Jumlah Sekolah Swasta Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Tahun 2017

Kecamatan	Sekolah Swasta	
	S	SMK

	D	MP	MA	
Langgam			0	1
Pangkalan			4	4
Kerinci	3			
Bandar Sei			1	0
Kijang				
Pangkalan			0	1
Kuras				
Ukui			0	2
Pangkalan			0	0
Lesung				
Bunut			0	0
Pelalawan			0	0
Bandar			0	1
Petalangan				
Kuala			0	0
Kampar				
Kerumutan			0	0
Teluk			0	0
Meranti				
Jumlah	9	5	5	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 2018

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, penggalakan program KB.

Adapun sarana kesehatan yang ada di pelalawan tahun 2017 adalah, rumah sakit 4 unit, praktek dokter 14 unit, praktker dokter gigi 4 unit, dan klinik 32 unit. Disamping itu, tersedia pula puskesmas pembantu 36 unit, poskesdes/polindes 123 unit serta posyandu 361 unit.

Jumlah bidan terdaftar sebanyak 408 orang. Sehingga rasio ketersediaan bidan terhadap penduduk adalah 1.075 penduduk per satu orang bidan. Realisasi keluarga berencana tahun 2017 mencapai angka 84,33% terhadap pasangan usia subur. Keberhasilan program keluarga berencana diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,71%

3. Agama

Rumah Ibadah di bangun dalam rangka memfasilitasi aktivitas keagamaan masing-masing umat beragama. Pada tahun 2016. Jumlah mesjid adalah 398 unit, mushalla 712 unit dan gereja 107 unit.

Di Kabupaten Pelalawan kehidupan antara umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Pelalawan yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik,

Hindu dan Budha dimana dari Mayoritas penduduk Kabupaten Pelalawan beragama Islam.

d. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Pada tahun 2017, Kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 104 Desa yang berjumlah sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah RT dan RW yang masing-masing sebanyak 1.840 dan 654.

Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2017 adalah 35 orang, yang masih terdiri dari 33 laki-laki dan 2 perempuan. Fraksi dengan jumlah anggota terbanyak adalah Fraksi Golkar.

Selama tahun 2017 DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan 209 sidang yang terbagi dalam 4 masa sidang, dari bulan Januari-Desember 2017. Dari sidang yang dilakukan, dihasilkan 92 keputusan yang terdiri dari 13 Rancangan Peraturan Daerah, 30 Keputusan Pimpinan, 15 Rapat Badan Musyawarah dan 15 Rapat Badan Anggaran.

Tabel IV.III : Nama Bupati Pelalawan dan Masa Jabatannya

Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Masa Jabatan
H. Tengku Azmun Jaafar	H. Anas Badrun	2001-2006
H. Tengku Azmun Jaafar	H. Rustam Efendi	2006-2010

H. Rustam Efendi	HM. Harris	2010-2012
HM. Harris	Marwan Ibrahim	2012-2016
HM. Harris	H. Zardewan	2016-2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

5.1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang peneliti jadikan sebagai pertanyaan secara jelas dan lengkap. Adapun responden tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar, Pedagang.

5.1.1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja pada suatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi cara berfikir serta wawasan yang dimiliki seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kabupaten Pelalawan terlihat tingkat pendidikan responden terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.I : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

o.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
	SD	3	30%
	SMP	3	30%

	SMA	2	20%
	S.1	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

5.1.2. Berdasarkan Umur

Untuk dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan produktifitas kinerja, maka tingkat umur juga akan menjadi pertimbangan terhadap inovasi dan kreatifitas dalam pekerjaan. Adapun tingkat umur responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.II : Identitas Responden Berdasarkan Umur

o.	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
.	25-35	2	20%
.	36-46	6	60%
.	47-57	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan 2019

5.1.3. Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga dapat membedakan tingkat emosional responden yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.III : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

o.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
	Laki-laki	4	40%
	Perempuan	6	60%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan 2019

5.2. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan daerah nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan telah di bentuk Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kemudian menindak lanjuti Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2011. Adapun Tugas Pokok Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai berikut.

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan usulan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka pengembangan industri.
2. Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas, bimbingan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk pengembangan perdagangan daerah
3. Bidang pasar mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, rehabilitas dan pengelolaan pasar.

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama dikawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang langsung dalam masyarakat (Sutiyanto, 2008).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjelaskan tentang

pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selali menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia.

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

5.2.1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut George R. Terry Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. diperlukan untuk mengadakan visualisasi dan

melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Tradisional yaitu para petugas pasar, dengan melakukan perencanaan tersebut kepala pasar bekerja sama dengan para petugas untuk merencanakan kinerja yang baik untuk pengelolaan pasar, dengan perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang jelas. Demikian pula halnya dalam perencanaan, selalu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan. Dalam hal ini atasan bertanggung jawab untuk menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut. Hal tersebut yang biasanya dituangkan dalam sasaran kerja.

Dalam pengelolaan pasar terutama proses awal yang harus dilakukan adalah menetapkan rencana yang akan dikerjakan, karena dengan rencana yang jelas kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan sasaran akan tercapai. Sesuai rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pengelolaan itu sendiri, hal ini diperlukan bila pengelolaan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri, untuk mengetahui bagaimana perencanaan dalam mengelola Pasar Tradisional Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Terdapat tiga sub indikator yaitu ;

- a. Adanya penataan pasar

Penataan pasar merupakan kebijakan yang diambil Dinas pengelolaan pasar dimana pada kebijakan ini akan dilakukan pembenahan dan penyempurnaan pasar tradisional yang ada saat sekarang ini. Tujuan dari kebijakan ini yaitu agar pasar tradisional di sorek satu ini dapat beroperasi dengan baik lagi dan menjadi lebih efektif untuk digunakan masyarakat baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan yang telah disusun oleh Dinas pengelolaan pasar adalah penataan pasar atau dapat diartikan sebagai penyempurnaan dan pembenahan bentuk fisik pasar. Dalam kebijakan revitalisasi pasar ini terdapat perencanaan-perencanaan kegiatan yang telah direncanakan Dinas pengelolaan pasar agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar;

“dinas perindustrian perdagangan sudah melakukan penataan terhadap pasar tradisional Sorek Satu. Penataan dilakukan dalam satu bulan sekali, penataan tersebut dilakukan untuk menata para pedagang kaki lima. Penataan dalam hal ini bertujuan agar pedagang kaki lima dapat dengan tertib berjualan di pasar tradisional sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek Adanya Penataan Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan menyatakan sudah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima dapat dengan tertib berjualan di pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar . (selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan penataan, namun penataan tersebut belum optimal sehingga pedagang kaki lima masih belum tertib”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penataan pasar, Kasi Pengelola pasar menyatakan sudah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Pengelola Pasar Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan penataan Pasar Tradisional Sorek Satu setiap satu bulan sekali, penataan tersebut dilakukan oleh petugas pengelola. Penataan dilakukan untuk menertibkan para pedagang kaki lima agar tertib dalam berdagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penataan pasar, petugas pengelola pasar menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan penataan pasar tradisional sorek satu setiap sebulan sekali agar pedagang kaki lima tertib dalam berdagang.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada Pedagang Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan penataan satu bulan sekali terhadap Pasar Tradisional Sorek Satu, Dinas Perindustrian Perdagangan hanya melakukan penataan setiap enam bulan sekali, ataupun tidak sama sekali”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penataan pasar, Pedagang sorek satu menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan penataan setiap satu bulan sekali, tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan penataan tersebut setiap enam bulan sekali ataupun tidak sama sekali melakukan penataan pasar.

Berdasarkan hasil observasi penelitian lapangan terkait sub indikator penataan pasar adalah belum optimalnya penataan pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan terkait pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir bahu jalan dan menyebabkan ketidak tertiban dalam berjualan. (sabtu, 23 November 2019)

b. Adanya renovasi

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional masih lebih menekankan pada perbaikan atau renovasi fisik bangunan pasar. Masih sangat jarang yang disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat serta perdagangan pasar.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar; . (selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan renovasi terhadap pasar, seperti kios, los, toilet, mushola, dan jalan, agar para pengunjung pun nyaman terhadap Pasar Tradisional tersebut. Tetapi banyak

juga pengunjung dan pedagang yang tidak merawat hal tersebut, dan mengakibatkan ketidaknyamanan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya renovasi, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan renovasi terhadap pasar tradisional agar para pedagang nyaman menggunakan fasilitas yang ada dipasar.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan renovasi, renovasi itu dilakukan setahun sekali terutama pada kios, los, toilet, mushola dan jalan sehingga masyarakat nyaman ketika berada di pasar serta terciptanya bangunan yang bersih, tertib dan aman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya renovasi, Kasi Pengelola Pasar menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan renovasi terhadap pasar tradisional agar masyarakat nyaman ketika berada di pasar dan terciptanya bangunan yang bersih, tertib, dan aman.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Pengelola Pasar Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan renovasi Pasar Tradisional setahun sekali, renovasi tersebut juga dilakukan oleh petugas pengelola. Adanya renovasi itu bertujuan untuk membuat pasar lebih rapi,nyaman, bersih dan tentram”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya renovasi, Petugas Pengelola pasar menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah

melakukan renovasi pasar tradisional setahun sekali. Renovasi itu bertujuan untuk membuat pasar lebih rapi, nyaman, bersih dan tentram.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada Pedagang Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan tidak ada melakukan renovasi terhadap Pasar Tradisional Sorek Satu, para pedagang merasa tidak nyaman ada dilingkungan pasar karena fasilitas yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik begitupun dengan pengunjung pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya renovasi, Pedagang Sorek Satu menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan tidak ada melakukan renovasi terhadap pasar tradisional sorek satu, sehingga para pedagang merasa tidak nyaman ada dilingkungan pasar karena fasilitas yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penelitian lapangan terkait sub indikator adanya renovasi pasar adalah belum terlaksananya renovasi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan terkait masih banyaknya fasilitas kios, los. Toilet, mushola yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik begitu juga dengan pengunjung pasar.

c. Adanya pengelolaan retribusi pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, los,

dasar dan retribusi parkir. Retribusi pasar ialah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, los dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitaran pasar.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar; (selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pemungutan retribusi kepada setiap pedagang, pemungutan retribusi itu sebesar Rp. 2.500/hari”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengelolaan retribusi pasar, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pemungutan retribusi.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar ;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pemungutan retribusi kepada setiap pedagang, retribusi tersebut di pungut setiap hari sebesar Rp. 2.500/hari dan pemungutan itu dilakukan kepada setiap pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengelolaan retribusi pasar, Kasi Pengelolaa menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pemungutan retribusi. Pemungutan itu dilakukan kepada setiap pedagang yang berjualan di pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Pengelola Pasar Sorek Satu;

“petugas sudah melakukan pemungutan retribusi, retribusi dilakukan setiap hari sebesar Rp. 2.500/hari, dan pemungutan itu di lakukan kepada setiap pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengelolaan retribusi pasar, Petugas pengelola pasar menyatakan Petugas sudah melakukan pemungutan retribusi. Pemungutan itu dilakukan kepada setiap pedagang yang berjualan di pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada Pedagang Sorek Satu;

“pemungut retribusi sudah dilakukan, tetapi petugas tersebut hanya melakukan pemungutan kepada pedagang yang tidak dikenal”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengelolaan retribusi pasar, Pedagang Sorek Satu menyatakan pemungutan retribusi sudah dilakukan tetapi pemungutan tersebut hanya dilakukan kepada pedagang yang tidak di kenal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait adanya pengelolaan retribusi pasar adalah pengelolaan retribusi tersebut masih tidak berjalan dengan baik, karena pemungutan yang dilakukan petugas pengelola kepada pedagang yang tidak dikenal saja, sedangkan pada pedagang yang dikenal tidak di pungut. (Sabtu, 23 November 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan menyimpulkan bahwa indikator perencanaan terkkait penataan pasar belum optimal dilakukan namun pada renovasi Dinas Perindustrian Perdagangan tidak melakukan renovasi terhadap pasar tradisional tetapi terhadap pengelolaan retribusi masih dijumpai keganjalan yang dilakukan petugas terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan di pasar tradisional sorek satu.

5.2.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masingmasing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu

“...Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Terry (Sukarna, 2011: 46) juga mengemukakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu :

- a. Tujuan
- b. Pembagian kerja
- c. Penempatan tenaga kerja
- d. Wewenang dan tanggung jawab
- e. Pelimpahan dan wewenang

Berdasarkan fungsi dan struktur Organisasi Dinas Pasar yang dijelaskan maka petugas yang terlibat dalam pengelolaan pasar Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dalam melakukan *Organizing* pembagian kerja dinas Pasar bisa dilihat, yaitu melibatkan :

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Umumnya masalah organisasi memegang peranan penting yaitu akan menentukan suatu pekerjaan seseorang yang harus dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, oleh karena itu organisasi harus memiliki bentuk dan susunan. Walaupun pembagian kerja telah ditentukan, namun dalam melaksanakan pengelolaan pasar ternyata tumpang tidih pekerjaan tidak dapat dihindarkan pada Dinas Pasar Sorek Satu, hal ini dikarenakan Dinas Pasar Sorek Satu masih memiliki jumlah pegawai yang masih kurang untuk melakukan pengelolaan terhadap pedagang dikawasan pasar.

a. Adanya pembagian kerja

Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh Karena itu pembagian kerja bearti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus

ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian kerja dapat menjadikan orang bertambah keterampilan dalam menangani tugasnya, karena tugasnya itu merupakan bidang tertentu saja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja terutama dalam memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisien kerjanya. Sebaliknya jika pembagian kerja itu dilakukan dengan ceroboh, artinya tidak menyesuaikan kemampuan seseorang dengan bidang pekerjaannya, maka ia akan berpengaruh tidak baik bahkan dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaannya.

Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dengan pembagian tugas pekerjaan, ditetapkan sekaligus susunan organisasi (struktur organisasi), tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Pembagian tugas saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh dari penerapan spesialisasi, tetapi pula dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan pula dalam mempermudah pengawasan oleh atasan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan pembagian kerja kepada staf-staf. Pembagian kerja tersebut sudah memiliki tugasnya seperti melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pembagian kerja, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pembagian kerja kepada staf-stafnya. Pembagian kerja tersebut sudah memiliki tupoksinya masing-masing.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pembagian tugas, tugas tersebut terdiri dari pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pembagian kerja, Kasi pengelola Pasar memyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pembagian tugas masing-masing, Tugas tersebut terdiri dari pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelola pasar sorek satu;

“pembagian tugas sudah melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing, adapun tugas-tugas tersebut sudah dibagi menjadi pengelola pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pembagian kerja, Petugas Pengelola Pasar menyatakan dinas perindustrian perdagangan sudah membentuk pembagian kerja antar petugas dalam pengelolaan pasar tradisional sorek satu seperti petugas pengelola pasar yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait sub indikator adanya pembagian kerja adalah Dinas Perindustrian Perdagangan sudah membagi kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. (Sabtu, 23 November 2019)

b. Adanya tingkat pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Jadi tingkat Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional sorek satu, pengawasan itu dilaksanakan tiga bulan sekali, pengawasan itu dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan pasar, Kasi Pengelolaan Pasar dan Petugas Pengelola Pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya tingkat pengawasan, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan tingkat pengawasan setiap tiga bulan sekali terhadap pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pengelolaan pasar;

“kepala bidang pengelola, kasi pengelolaa dan petugas pengelola sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional sorek satu, pengawasan itu dilaksanakan tiga bulan sekali”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya tingkat pengawasan, Kasi Pengelola Pasar menyatakan Kepala Bidang sudah melakukan pengawasan terhadap pasar dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Selanjutnya untuk mendapat informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelolaan pasar sorek satu;

“kepala bidang pengelola, kasi pengelola sudah melakukan pengawasan secara terus setiap tiga bulan sekali, pengawasan itu dilakukan kepada setiap pedagang. Pengawasan itu dilaksanakan untuk melihat-melihat produk yang dijual layak atau tidak layak dipasarkan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya tingkat pengawasan, Petugas Pengelola Pasar menyatakan Kepala Bidang sudah melakukan pengawasan secara terus menerus, pengawasan itu dilakukan untuk melihat-melihat produk yang layak dijual atau tidak layak dipasarkan.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang sorek satu;

“kepala bidang pengelola, kasi pengelola dan petugas pengelola sudah melakukan pengawasan, namun pengawasan yang dilakukan tidak menyeluruh hanya kepada pedagang tertentu saja”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya tingkat pengawasan, Pedagang Sorek Satu menyatakan Kepala Bidang, Kasi Pengelola dan Petugas Pengelola sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional, tetapi pengawasan itu tidak menyeluruh dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya tingkat pengawasan adalah dilihat dilapangan pengawasan itu tidak merata dilakukan kepada setiap pedagang yang berada dipasar sorek satu. (Sabtu, 23 November 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian menyimpulkan bahwa indikator pengorganisasian terkait pembagian kerja sudah berjalan dengan baik namun nyatanya pada tingkat pengawasan belum optimal dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan.

5.2.3. Pengarahan (*Directing*)

Menurut George R Terry Pengarahan adalah usaha memberi bimbingan dan/atau perintah kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, agar tugas para karyawannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan semula. Fungsi ini biasa juga disebut supervisi. Dimana pembagian tugas adalah penjabaran tugas/pekerjaan agar setiap karyawan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatannya dalam organisasi. Ini menyangkut pembinaan motivasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk mencapai tujuan utama. Salah satu aspek penting dari fungsi ini adalah fungsi koordinasi, yang berarti penciptaan suatu harmoni dari individu-individu yang berkerja bersamasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan komunikasi menjadi kunci keberhasilan fungsi ini.

Pengarahan bukan saja agar pegawai melaksanakan atau bukan melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya dengan tindakan berupa perintah, komunikasi,

nasehat motivasi, dan sebagainya berupa kegiatan yang dapat mendorong tenaga kerja melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati.

Fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan, yang melakukan penggerakan terhadap para pedagang di pasar yaitu kepala Dinas dan para petugas untuk mengarahkan di lapangan pasar, dengan bersosialisasi dengan pedagang, sehingga mereka mentaati tata tertib dan aturan yang sudah ditetapkan.

Organisasi harus memiliki prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab, seorang bawahan / pedagang hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa dia memberi pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugasnya, para petugas dinas melakukan penggerakan kepada pedagang dengan cara turun langsung kelapangan dengan mengarahkan bagaimana aturan yang harus dipatuhi di pasar. Dalam hal terdapat dua sub indikator yaitu.

a. Adanya koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan koordinasi dengan para pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional sorek satu, koordinasinya seperti penghimbau kepada para pedagang untuk membayar kewajiban yang sudah ditetapkan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya koordinasi, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perindustrian Perdagangan bahwa koordinasi sudah dilakukan terhadap para pedagang pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pengelolaan pasar sorek satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan koordinasi sesama para pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional sorek satu, koordinasinya seperti penghimbau kepada para pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya koordinasi, Kasi Pengelola menyatakan bahwa koordinasi sudah dilakukan terhadap para pedagang pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelola pasar sorek satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan koordinasi sesama para pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional sorek satu, koordinasinya seperti penghimbau kepada para pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya koordinasi, Petugas Pengelola Pasar menyatakan bahwa koordinasi sudah dilakukan terhadap para pedagang pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang sorek satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan koordinasi kepada para pedagang, baik dalam pengelolaan pasar maupun himbauan untuk bekerja sama, sehingga koordinasi antara Disperindag dan pedagang tidak berjalan dengan baik”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya koordinasi, Pedagang Sorek Satu menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan belum melakukan koordinasi mengenai pengelolaan pasar dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi Dinas Perindustrian perdagangan terhadap para pedagang.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya koordinasi adalah dilihat di lapangan Dinas Perindustrian Perdagangan tidak melakukan koordinasi mengenai pengelolaan pasar dengan baik terhadap pedagang seperti himbauan bekerja sama dalam mengelola pasar. (Sabtu, 23 November 2019)

b. Adanya pengarahan kepada pedagang

Pengarahan adalah fase kerja manajemen, dimana dinas perindustrian perdagangan dan pasar berusaha memotivasi, membina komunikasi, menangani konflik, kerja sama, dan negosiasi. Pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh dinas.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, sosialisasi dilakukan setiap sebulan sekali, sosialisasi itu bertujuan untuk menginformasikan mengenai pengelolaan pasar tradisional sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengarahan kepada pedagang, Kepala Bidang menyatakan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan pasar tradisional sudah dilakukan setiap sebulan sekali, sosialisasi itu bertujuan untuk menginformasikan mengenai pengelolaan pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah rutin melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi itu dilakukan setiap sebulan sekali, sosialisasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi antar petugas dan pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengarahan kepada pedagang, Kasi Pengelola menyatakan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan pasar tradisional sudah dilakukan, sosialisasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi antar petugas dan pedagang pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelola pasar sorek satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah rutin melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi itu dilakukan setiap sebulan sekali, sosialisasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi antar petugas dan pedagang”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengarah kepada pedagang, Petugas Pengelola Pasar menyatakan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan pasar tradisional sudah dilakukan, sosialisasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi antar petugas dan pedagang pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang sorek satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pengelolaan pasar tradisional sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengarah kepada pedagang bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pengelolaan pasar dalam bentuk apapun.

Berdasarkan hasil observasi penelitian lapangan terkait sub indikator adanya pengarah kepada pedagang adalah dilihat lapangan Dinas Perindustrian Perdagangan tidak pernah melakukan pengarah kepada pedagang seperti sosialisasi kepada para pedagang mengenai pengelolaan pasar dalam bentuk apapun. (Sabtu, 23 November 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian menyimpulkan bahwa indikator pengarah terkait adanya koordinasi belum berjalan dengan baik

namun pengarahan kepada pedagang belum ada dilakukan dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan terhadap pasar tradisional sorek satu.

5.2.4. Pengawasan (*controlling*)

Menurut George R Terry pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa Pengawasan, yaitu:

“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Terry (Sukarna, 2011: 116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- a. menentukan standard atau dasar bagi pengawasan
- b. ukuran pelaksanaan
- c. bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan
- d. perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat

Pengawasan (*controlling*) adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Supaya kebijakan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan pasar, maka perlu adanya pengawasan. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Di pasar melakukan pengawasan yaitu kepala pasar dan para petugas pasar yang mengawasi setiap para pedagang agar tidak ada hal yang menyimpang, dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini dikarenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan terbukti masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan pasar sorek satu sehingga membuat tata ruang pasar menjadi tidak teratur. Kepala seksi pengelolaan sarana dan prasarana melengkapi sarana dan prasarana yang ada di pasar sorek satu, yaitu dengan menyediakan are tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarangan tempat tetap saja bermunculan di pasar sorek satu. Begitu juga dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemungutan retribusi

pasar, sikap dan perilaku masyarakat yang menghambat para petugas untuk memungut retribusi di pasar sorek satu masih terjadi sampai dengan sekarang. Hal ini dapat dilihat dari sikap perilaku pemilik kios dan los yang seenaknya membayarkan setiap harinya dengan mempunyai kios atau los 5 mereka hanya membayarkan 2 kios atau los tersebut. Oleh karena itu petugas mengeluh akan kesadaran masyarakat yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar. Dalam hal ini terdapat dua sub indikator yaitu :

a. Adanya pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik dilapangan.

Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pengawasan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pengawasan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang pasar sorek satu. Pengawasan langsung itu dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, pengawasan itu dilakukan oleh kepala bidang, kasi pengelola serta petugas pengelola pasar sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan langsung, Kepala Bidang menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan langsung, pengawasan itu dilakukan setiap tiga bulan sekali terhadap pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Sorek Satu;

“Kepala Bidang Pengelola sudah melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang pasar sorek satu. Pengawasan itu dilakukan tiga bulan sekali”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan langsung, Kasi Pengelola menyatakan bahwa pengawasan tersebut sudah dilakukan setiap tiga bulan sekali terhadap pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelola pasar sorek satu;

“Kepala bidang, kasi pengelolaa sudah melakukan pengawasan langsung secara rutin setiap tiga bulan sekali, pengawasan itu dilakukan kepada pedagang pasar sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan langsung, Petugas Pengelola menyatakan bahwa pengawasan itu sudah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali, pengawasan itu dilakukan kepada pedagang pasar sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang sorek satu;

“pengawasan langsung itu sudah dilakukan oleh petugas pengelola pasar, namun nyatanya pengawasan itu kurang berjalan seperti yang diharapkan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan langsung, Pedagang Sorek Satu menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan petugas pengelola pasar sorek satu kurang berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait sub indikator adanya pengawasan langsung adalah Dinas Perindustrian Perdagangan belum optimal melakukan pengawasan langsung terhadap semua pedagang. (Sabtu, 23 November 2019)

b. Adanya pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana ataupun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan, surat pengaduan dari masyarakat, berita atau artikel dari media massa.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu; (Selasa, 19 November 2019)

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional sorek satu, melalui petugas-petugas pengelola pasar”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan tidak langsung, Kepala Bidang menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional melalui petugas pengelola pasar.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Sorek Satu;

“Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan tidak langsung, Kasi Pengelola menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan sudah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional sorek satu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada petugas pengelola pasar sorek satu;

“kepala bidang pengelola pasar telah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan tidak langsung, Petugas Pengelola Pasar menyatakan bahwa kepala bidang telah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional sorek satu

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara kepada pedagang sorek satu;

“pengawasan itu tidak dilakukan sama sekali oleh Dinas Perindustrian Perdagangan terhadap pedagang pasar tradisional sorek satu”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan tidak langsung, Pedagang Sorek Satu menyatakan bahwa pengawasan itu tidak dilakukan sama sekali oleh Dinas Perindustrian Perdagangan terhadap pedagang pasar sorek satu.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya pengawasan tidak langsung adalah Dinas Perindustrian Perdagangan tidak ada melakukan pengawasan begitu juga sebaliknya petugas pengelola pasar tidak pernah turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang. (Sabtu, 23 November 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan menyimpulkan bahwa indikator pengawasan terkait pengawasan langsung belum berjalan dengan baik, karena pengawasan langsung yang dilakukan tidak merata atau tidak menyeluruh dilakukan kepada pedagang pasar namun pada pengawasan tidak langsung tidak berjalan dengan semestinya.

5.3. Berdasarkan Hasil Wawancara Dan Observasi Yang Peneliti Lakukan Dapat Dirangkap Beberapa Hambatan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Yaitu Sebagai Berikut:

1. Kurangnya tanggung jawab dari Dinas Perindustrian Perdagangan dalam pengelolaan pasar tradisional sorek satu sehingga sangat minimnya peran dalam pengelolaan pasar tersebut.
2. Sulitnya kesadaran dan membangun kerja sama bersama masyarakat terutama para pedagang agar ikut menata pasar.
3. Koordinasi yang kurang baik antara petugas pengelolaan pasar dengan para pedagang, dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat yang mengatakan hanya sebatas himbauan berupa karcis, tidak ada dari pihak petugas pengelola pasar yang mengosialisasikan pentingnya pengelolaan retribusi.
4. Minimnya dan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh pengelolaa pasar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pelalawan maka penelusi membuat kesimpulan :

1. perencanaan terkait penataan pasar belum optimal dilakukan oleh Dinas namun pada renovasi Dinas Perindustrian Perdagangan tidak melakukan renovasi terhadap pasar tradisional tetapi terhadap pengelolaan retribusi masih dijumpai keganjalan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan di pasar tradisional sorek satu.
2. pengorganisasian terkait pembagian kerja sudah berjalan dengan baik namun tetapi pada tingkat pengawasan belum optimal dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan.
3. Pengarahan terkait adanya koordinasi belum berjalan dengan baik namun pengarahan kepada pedagang belum ada dilakukan dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan terhadap pasar tradisional sorek satu.
4. Pengawasan terkait pengawasan langsung belum berjalan dengan baik, karena pengawasan langsung yang dilakukan tidak merata atau tidak menyeluruh dilakukan kepada pedagang pasar namun pada pengawasan tidak langsung tidak berjalan dengan semestinya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparatur pemerintah yang terkait yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, kepada kepala seksi pengelolaan dan kerjasama, kepala seksi sarana dan prasarana, kepala seksi ketertiban dan kebersihan pasar dan petugas pemungut retribusi Pasar Sorek Satu dengan melakukan pengawasan pasar tradisional di kabupaten pelalawan.
2. Diharapkan kepada Disperindag dengan mengadakan sosialisasi terhadap pedagang agar para pedagang mematuhi tata tertib demi kenyamanan bersama.
3. Seharusnya para pedagang ditempatkan di tempat yang layak untuk tidak berjualan di tempat umum khususnya kepada PKL yang kurang disiplin dalam berjualan, sehingga pasar menjadi pasar menjadi tidak teratur dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan harus dengan pengawasan yang dilakukannya sehingga para pedagang tertib untuk berjualan.
4. Diharapkan kepada Disperindag mengawasi fasilitas pasar dengan memperhatikan fasilitas disekitar pasar agar dengan ketersediaan fasilitas pasar bisa dipakai dan digunakan dengan layak, sehingga tidak akan terjadi keluhan masyarakat. Saran pnelitian yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pelalawan seharusnya membenahi pasar secara efektif dan efisien dan meningkatkan optimalisasi pasar kabupaten pelalawan perlu melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Abdullah, Mikrajudin. (2016). *Fisika Dasari I*. Bandung: ITB
- Abdurrahman, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta ; Graha.
- Amstrong dan Kotler. 1999. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta ; Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Buchari Alma, 2008. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Case, Karl E & Fair, Ray C; 2002, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Pearson Education Asia Pte. Ltd. Dan PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Edy Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetak Ke enam*. Pranada Media Group, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Penerbit : BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. “ *Manajemen* “ Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____ 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____ 2012. “ *Manajemen Sumber Daya Manusia* ”. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo. 2014. *Basic Marketing (Dasar-dasar Marketing) Cara Mudah Memahami Ilmu Pemasaran*. Yogyakarta : Gosyeng Publishing
- Marwansyah. 2010. “ *Manajemen Sumber Daya Manusia* ”. Bandung Alfabeta.
- Masitoh, E. (2013). *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. *Jurnal PMI Vol. X. No 2, Maret 2013*

- Moekijat. 2005. *Manajemen Kepegawaian dan Hubungan Dalam Perusahaan. Edisi Ketiga*. Alumni : Bandung.
- Mursid, M, Drs. (2014). *Managemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____.2001. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nitisusantro, Mulyadi. 2012. *Perilaku Konsumen*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan di Tinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yasir Watampone.
- Sedermayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- _____. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2007 , *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Terry, George R. 1958. *Principles Of Management*, PT.Bumi Aksara : Jakarta
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*, Edisi Ketiga. Andi, Yogyakarta
- Torang ,Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Wicaksono. (2011). *Pengaruh Modal Awal, lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak*. Universitas Diponegoro : Semarang

Dokumentasi :

Undang-undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawa Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Menjelaskan Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

